

Daftar Isi

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan Skripsi	ii
Surat Keterangan Pengganti Lembar Pengesahan Skripsi	iii
Halaman Pernyataan Bebas Plagiasi	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel	xii
Daftar Gambar	xiii
Daftar Lampiran	xiv
Daftar Arti Lambang dan Singkatan	xv
Abstraksi	xviii
<i>Abstract</i>	xix
 BAB I. PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	23
1.3 Pertanyaan Penelitian	24
1.4 Tujuan Penelitian	25
1.5 Motivasi Penelitian	26
1.6 Manfaat Penelitian	27
1.7 Kontribusi Penelitian	28
1.8 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian	30
1.9 Sistematika Penulisan	32
 BAB II. LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA	 34
2.1 Landasan Teori dan Pengungkapan LKPD	34
2.1.1 Pemerintah daerah di Indonesia	34
2.1.2 Teori keagenan pada pemerintahan	35
2.1.3 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	38
2.1.4 Perubahan peraturan pengelolaan keuangan negara	41
2.1.5 Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	43
2.1.6 Pengungkapan pada LKPD dan CaLK	44

2.2	Karakteristik Pemerintah Daerah	48
2.3	Kompleksitas Pemerintah Daerah	50
2.4	Tingkat Akuntabilitas Pemerintah Daerah	52
2.5	Penelitian-Penelitian Sebelumnya	53
2.6	Kerangka Berpikir	57
2.7	Hipotesis Penelitian	61
2.7.1	Pengaruh pembiayaan utang pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan LKPD	61
2.7.2	Pengaruh tingkat kemandirian pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan LKPD	61
2.7.3	Pengaruh umur administratif pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan LKPD	62
2.7.4	Pengaruh jumlah SKPD pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan LKPD	63
2.7.5	Pengaruh ukuran legislatif pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan LKPD	64
2.7.6	Pengaruh temuan sistem pengendalian intern pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan LKPD	65
2.7.7	Pengaruh temuan kepatuhan atas peraturan perundang-undangan suatu pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan LKPD	66

BAB III. METODE PENELITIAN 67

3.1	Desain Penelitian	67
3.2	Definisi Operasional Variabel	68
3.2.1	Variabel dependen	68
3.2.2	Variabel independen	70
3.2.2.1	Pembiayaan Utang (UTANG)	70
3.2.2.2	Tingkat Kemandirian (MANDIRI)	71
3.2.2.3	Umur administratif (AGE)	72
3.2.2.4	Jumlah SKPD (SKPD)	72
3.2.2.5	Ukuran legislatif (ULEG)	73
3.2.2.6	Sistem Pengendalian Intern (SPI)	73
3.2.2.7	Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan (KEPATUHAN)	74
3.3	Populasi dan Sampel	77
3.4	Instrumen Penelitian	78
3.5	Teknik Pengumpulan Data	79
3.6	Teknik Analisis Data	81
3.6.1	Statistik deskriptif	81
3.6.2	Uji asumsi klasik	82
3.6.2.1	Uji normalitas	82
3.6.2.2	Uji multikolinieritas	83
3.6.2.3	Uji heteroskedastisitas	83
3.6.2.4	Uji autokorelasi	84
3.6.3	Analisis regresi linear berganda	85

3.6.3.1 Uji koefisien determinasi (Uji R^2)	86
3.6.3.2 Uji-F (Uji pengaruh simultan)	86
3.6.3.3 Uji-t (Uji pengaruh parsial)	87
3.6.3.4 Model regresi linear berganda	88

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 90

4.1 Deskripsi dan Hasil Pemilihan Data	90
4.2 Pengujian Model	92
4.2.1 Statistik deskriptif	92
4.2.1.1 Variabel dependen	93
4.2.1.2 Variabel independen	95
4.2.1.2.1 Pembiayaan Utang (UTANG)	95
4.2.1.2.2 Tingkat Kemandirian (MANDIRI)	96
4.2.1.2.3 Umur administratif (AGE)	96
4.2.1.2.4 Jumlah SKPD (SKPD)	96
4.2.1.2.5 Ukuran legislatif (ULEG)	97
4.2.1.2.6 Sistem Pengendalian Intern (SPI)	97
4.2.1.2.7 Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (KEPATUHAN)	98
4.2.2 Uji asumsi klasik	98
4.2.2.1 Uji normalitas	99
4.2.2.2 Uji multikolinieritas	100
4.2.2.3 Uji heteroskedastisitas	101
4.2.2.4 Uji autokorelasi	103
4.2.3 Pengujian regresi linear berganda	104
4.2.3.1 Uji koefisien determinasi (Uji R^2)	104
4.2.3.2 Uji-F (Uji pengaruh simultan)	105
4.2.3.3 Uji-t (Uji pengaruh parsial)	106
4.2.3.4 Persamaan regresi linear berganda	107
4.3 Pengujian Hipotesis Penelitian	110
4.3.1 Pengaruh pembiayaan utang pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan LKPD	111
4.3.2 Pengaruh tingkat kemandirian pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan LKPD	111
4.3.3 Pengaruh umur administratif pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan LKPD	112
4.3.4 Pengaruh jumlah SKPD pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan LKPD	112
4.3.5 Pengaruh ukuran legislatif pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan LKPD	113
4.3.6 Pengaruh temuan sistem pengendalian intern pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan LKPD	113
4.3.7 Pengaruh temuan kepatuhan atas peraturan perundang-undangan suatu pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan LKPD	114
4.4 Pembahasan Hasil Penelitian	114

4.4.1	Pengaruh pembiayaan utang pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan LKPD	114
4.4.2	Pengaruh tingkat kemandirian pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan LKPD	115
4.4.3	Pengaruh umur administratif pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan LKPD	116
4.4.4	Pengaruh jumlah SKPD pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan LKPD	117
4.4.5	Pengaruh ukuran legislatif pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan LKPD	118
4.4.6	Pengaruh temuan sistem pengendalian intern pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan LKPD	119
4.4.7	Pengaruh temuan kepatuhan atas peraturan perundang-undangan suatu pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan LKPD	120
4.5	Hasil Penelitian	121
BAB V. SIMPULAN		130
5.1	Simpulan	130
5.2	Keterbatasan	132
5.3	Implikasi	133
5.4	Saran	134
Daftar Pustaka		135
Lampiran		140